



Oei Tjeng Hien dan Masjid Lautze: Politik Identitas Tionghoa Muslim

Alexander Raymon,^{1*} Putri Agus Wijayati¹

¹Universitas Negeri Semarang, Indonesia

*medialenterakebajikan@students.unnes.ac.id

Dikirim: 09-07-2025; Direvisi: 15-08-2025; Diterima: 16-08-2025; Diterbitkan: 31-08-2025

Abstrak: Tionghoa Muslim memiliki isu identitas kultural sebagai minoritas ganda (*double minority*). Dalam konteks eksistensial, kelompok ini minoritas di tengah agama etnisnya, dan tetap menjadi minoritas di tengah etnis lain di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji Tionghoa Muslim dengan identitas dan budayanya dalam memanfaatkan masjid Lautze sebagai sarana dakwah dan politik. Kajian ini penting dan menjadi urgen dalam upaya menghadapi diskriminasi dan rasisme terhadap etnis Tionghoa yang hingga kini masih sering dianggap sebagai “orang asing” di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif untuk membahas politik Tionghoa Muslim sebagai ekspresi identitas keimanan mereka dalam membangun persaudaraan dengan kaum muslim di Indonesia serta tetap mempertahankan identitas kulturalnya sebagai etnis Tionghoa agar tidak mengalami alienasi di tengah komunitasnya. Melalui kajian ini, ditemukan bahwa kehidupan sosial politik Tionghoa Muslim di Jakarta secara umum, dan di Masjid Lautze Jakarta khususnya, merupakan manifestasi keislaman megapolitan yang dipadukan dengan identitas ketionghoaan inklusif. Visi politik Tionghoa Muslim yang diekspresikan dengan mempertahankan latar belakang kulturalnya, juga ditunjukkan melalui gerakan politik Oei Tjeng Hien yang didasari ajaran Islam universal yang menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan.

Kata Kunci: identitas; masjid Lautze; Oei Tjeng Hien; politik; Tionghoa muslim

Abstract: Chinese Muslims face the issue of cultural identity as a double minority. In an existential context, this group is a minority within their ethnic religion, and remains a minority among other ethnicities in Indonesia. This study uses qualitative and quantitative methods to discuss Chinese Muslim politics as an expression of their faith identity in building brotherhood with Muslims in Indonesia while maintaining their cultural identity as ethnic Chinese to avoid alienation within their community. Through this study, it was found that the socio-political life of Chinese Muslims in Jakarta in general, and at the Lautze Mosque in Jakarta in particular, is a manifestation of metropolitan Islam combined with an inclusive Chinese identity. The political vision of Chinese Muslims, expressed by maintaining their cultural background, is also demonstrated through the political movement of Oei Tjeng Hien, which is based on universal Islamic teachings that emphasize human values.

Keyword: Chinese muslim; identity; Lautze mosque; Oei Tjeng Hien; politics



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Pertautan antara Tionghoa dan Islam telah terjalin erat dalam temali sejarah dan budaya di Nusantara sejak berabad-abad lampau. Sejarah panjang tentang keberadaan etnis Tionghoa dan juga peranannya dalam perkembangan agama Islam di Indonesia khususnya di pulau Jawa merupakan salah satu fakta bahwa Islam dan Tionghoa di Indonesia tidak dapat dipisahkan.

(Alansyah, 2017). Namun dalam perjalanannya terjadi berbagai peristiwa mulai dari politik, sosial, hingga budaya yang membuat bumiputera dipandang kurang baik dimata etnis Tionghoa dan juga sebaliknya, akhirnya berdampak pula pada citra Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia dimata etnis Tionghoa akibat dari pemahaman yang salah tentang Islam karena kurangnya informasi tentang agama Islam dikalangan etnis Tionghoa.

Di Indonesia hubungan antara umat Islam dan Tionghoa seolah-olah berjarak jauh dan senjang. Pandangan umum umat Islam, etnis Tionghoa adalah “orang lain”, pendatang, eksklusif, bahkan harus dijauhi kalau tidak dibenci. Begitu pula sebaliknya bagi masyarakat Peranakan Tionghoa, orang-orang Islam (yang identik dengan golongan bumiputera) itu dianggap tertinggal, bodoh, pemalas, mudah disuap. Kedua sudut pandang masing-masing pihak ini bisa dianggap berlebihan dan mendramatisasi, namun agaknya relatif masih ada, meski sekarang berbeda dengan dahulu.

Bagi kalangan orang Tionghoa sendiri tidak mudah untuk memeluk agama Islam. Sejak masa kolonial Belanda, orang-orang Tionghoa mendapat informasi yang salah dan negatif mengenai Islam sekaligus juga diberi stigma yang negatif. Pihak pemerintah kolonial Belanda bahkan memiliki istilah yang cenderung merendahkan untuk menyebut golongan Tionghoa Muslim yaitu “Cina Cukuran”. Istilah ini timbul karena pada abad ke-18 orang-orang Cina yang menjadi Islam harus memotong kuncirnya (Ham, 1983). Dari sebutan ini jelas golongan Cina Islam masih dianggap asing, dalam artian berbeda dari umat Islam lainnya di Indonesia, yang mayoritas dipeluk oleh kaum bumiputera.

Dr. Onghokham pernah menyatakan kalau orang Islam menginginkan supaya orang Tionghoa memeluk agama Islam, perlu disiapkan fasilitas yang baik dan bermutu, selaras dengan budaya Cina, misalnya dalam bidang pendidikan (Wiwoho, 2016). Masjid Lautze Jakarta yang dibangun oleh Yayasan Karim Oei merupakan salah satu fasilitas penting dalam menjaring dan mendidik kelompok Tionghoa Muslim di Jakarta. Dari observasi penulis di lapangan, hingga pertengahan tahun 2024, sudah ribuan jemaat mualaf Tionghoa Muslim yang terdaftar di Masjid Lautze. Dalam perkembangannya, Masjid Lautze menjadi tempat berkumpul, bertemu, bertukar pikiran sekaligus wadah ekspresi politik bagi kelompok Tionghoa Muslim untuk menumbuhkan ukhuwah Islamiyah di kalangan mereka (Irma, 2018).

Berdirinya Masjid Lautze tak lepas dari rekam jejak perjuangan H. Abdul Karim Oei Tjeng Hien (Huang Qingxing 黃清興), seorang Tionghoa Baba (Peranakan) yang terlahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, pada 6 Juni 1905. Setelah merantau ke Bintuhan pada 1926, ia pun berkenalan dengan Islam. Dua tahun kemudian, tepatnya pada 1928, Oei menjadi seorang mualaf, suatu hal yang mengejutkan masyarakat Tionghoa di kota itu, terlebih pada waktu itu ia juga menjabat sebagai pemimpin Tionghoa Hwee Koan (Zhonghua Huiguan 中華會館) di Bintuhan.

Dengan semangat keislamannya yang mengesankan namun dengan tidak melupakan asal-usul ketionghoaannya, Oei Tjeng Hien keluar masuk kampung dan desa, mengunjungi pengajian-pengajian, berdakwah bersama para mubaligh serta menghadiri berbagai kegiatan agama. Pada sekitar 1930, Oei ditunjuk menjadi Ketua Cabang Muhammadiyah Bintuhan. Upaya gigih Oei memajukan Muhammadiyah di Bintuhan rupanya menimbulkan kecurigaan pihak Belanda hingga membuatnya mengalami percobaan pembunuhan dan akhirnya dipenjara. Pada 1938 Oei ditunjuk oleh Bung Karno menjadi Konsulat Muhammadiyah Bengkulu (1938-1952).



Gambar 1. H. Abdul Karim Oei Tjeng Hien (1905-1988)

Sumber: *Star Weekly* No. 369, 24 Januari 1953

Hasil penelitian sebelumnya mengenai peranan Oei Tjeng Hien dan Masjid Lautze dalam politik identitas Tionghoa Muslim telah dilakukan salah satunya oleh Mahaswara (2017) dan Mardotillah (2022) yang meneliti tentang pembauran etnis Tionghoa melalui organisasi Islam dan strategi politiknya. Penelitian oleh Hidayat (2011) dan Fikri (2022) yang meneliti peran masjid secara umum sebagai wadah sosial budaya, termasuk dalam upaya merangkul kelompok Tionghoa Muslim juga patut dicatat. Penelitian Irma (2018) berfokus pada ukhuwah Islamiyah di kalangan Tionghoa Muslim.

Berdasarkan penelusuran dan analisis temuan, pendekatan identitas dan multikulturalisme relevan dalam melihat dan menganalisis ruang politik (Ubed, 2002), dalam hal ini politik Tionghoa Muslim. Secara konseptual, politik identitas Tionghoa Muslim merupakan gerakan politik dengan kategori utamanya adalah pada perbedaan-perbedaan di tengah ruang publik dan keterbukaan identitas sebagai upaya positif untuk merespon semua kepentingan secara utuh.

Pendekatan politik identitas dan multikulturalisme oleh kelompok Tionghoa Muslim juga menunjukkan pembentukan identitas sosial individu seperti etnis atau ras (Sahlan, 2023). Stratifikasi ini membentuk sikap, perilaku, dan interaksi mereka dengan orang lain di tengah pandangan masyarakat terhadap Tionghoa secara umum dan Tionghoa Muslim khususnya (Rozi, 2023). Konsekuensi profesional yang dihadapi dari hal ini dapat memunculkan stigma sosial, diskriminasi, prasangka, dan stereotip negatif terhadap etnis tersebut (Tajfel & Turner, 1979; Hidayatulloh, 2021). Namun demikian, seiring arus globalisasi dan perubahan sosial politik, politik identitas menjadi suatu hal yang terhindarkan (Mustomi, et al., 2024), sepanjang dimanfaatkan untuk hal yang positif bagi kelompok Tionghoa Muslim khususnya.

Penelitian ini juga memiliki irisan yang kuat dengan studi-studi terdahulu yang membahas konversi, identitas, dan integrasi sosial Tionghoa Muslim di Indonesia. Susanto &

Wibowo (2020) mengungkapkan bahwa proses konversi agama pada etnis Tionghoa melibatkan negosiasi identitas yang kompleks, di mana unsur etnis, agama, dan kewarganegaraan saling berinteraksi. Penelitian ini mengkaji bagaimana negosiasi tersebut berlangsung secara konkret melalui kiprah Oei Tjeng Hien, yang mempertahankan budaya Tionghoa sambil aktif membangun ukhuwah Islamiyah. Kasus Masjid Lautze menjadi manifestasi dari pendekatan yang disebut Susanto & Wibowo sebagai strategi “identitas inklusif,” yang memanfaatkan perbedaan sebagai modal sosial.

Sejalan dengan itu, Sunesti & Woodward (2015) menekankan bahwa keberhasilan integrasi Tionghoa Muslim bergantung pada akses ke jaringan sosial dan tingkat penerimaan dari masyarakat mayoritas. Temuan ini sejalan dengan data wawancara dalam penelitian ini, di mana Tionghoa Muslim yang terlibat di Masjid Lautze dinilai lebih membaur, lebih bebas berpolitik, dan lebih diterima dalam kehidupan sosial. Fungsi Masjid Lautze sebagai pusat dakwah dan pembinaan mualaf sejalan dengan konsep yang diuraikan Sunesti & Woodward, yakni menjadikan ruang keagamaan sebagai sarana integrasi tanpa menanggalkan identitas kultural. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa politik identitas yang diarahkan pada keberterimaan terhadap keberagaman dapat menjadi kekuatan integratif di masyarakat multikultural seperti Indonesia.

Perbedaan dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah dari segi kualitatif sejarah dan strategi politik Oei Tjeng Hien yang menginspirasi dan mendorong bertumbuhnya orang-orang Tionghoa yang masuk Islam di tengah kentalnya jurang etnisitas di daerah awal Oei berkiprah, Bintuhan, Bengkulu. Peranannya tersebut kelak kemudian melahirkan Masjid Lautze sebagai wujud pembinaan berkelanjutan. Penelitian ini juga membahas secara kuantitatif terhadap dampak dan strategi politik Masjid Lautze sebagai wujud cita-cita Oei.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji Tionghoa Muslim dengan identitas dan budayanya dalam memanfaatkan masjid sebagai sarana dakwah dan politik. Kajian ini penting dan menjadi urgen dalam upaya menghadapi diskriminasi dan rasisme terhadap etnis Tionghoa yang hingga kini masih sering dianggap sebagai “orang asing” di Indonesia, terlepas apa pun agamanya. Pendekatan pertalian sosial, interaksi simbolik dan teori identitas serta multikulturalisme digunakan sebagai panduan dasar dalam penelitian ini untuk memerikan dan memecahkan fenomena ini serta untuk mendukung analisis. Penelusuran dan pengolahan data kemudian dipadu sebagai rangkaian konstruksi agar kemudian dapat ditarik sebagai sebuah kesimpulan.

Metode Penelitian

Tahap heuristik dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber sejarah tentang peranan Tionghoa Muslim dan organisasi seperti Yayasan Oei Tjeng Hien serta Masjid Lautze di tengah masyarakat multi-etnis, kemudian kritik sumber dimana penulis menggunakannya untuk memilah dan memperoleh fakta sejarah, yang diikuti tahap berikutnya yaitu interpretasi atau sintesis untuk mencari, mengkaji serta menyusun keterkaitan fakta-fakta sejarah kiprah politik Tionghoa Muslim yang saling berhubungan, untuk kemudian difinalisasi pada tahap akhir yaitu rekonstruksi dalam bentuk penulisan historiografi ini.

Sumber-sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari peristiwa atau pelaku sejarah yang diteliti, atau hasil observasi langsung penulis, yaitu: yang digunakan antara lain berupa literatur data dokumentasi internal Yayasan Oei Tjeng Hien, hasil observasi lapangan, serta wawancara dengan H. Ali Karim selaku keturunan langsung dari (Alm.) H. Abdul Karim Oei Tjeng Hien, termasuk observasi dan wawancara terhadap beberapa pengurus Masjid Lautze di Jakarta dan Bandung serta jajak pendapat responden Tionghoa

Muslim dan masyarakat umum terhadap peran Masjid Lautze. Sedangkan untuk sumber-sumber sekunder diperoleh dari penelitian, buku, atau tulisan sebelumnya yang menganalisis atau membahas topik terkait, seperti literatur akademik & penelitian terdahulu, buku dan arsip sejarah, serta artikel jurnal. Fakta sejarah yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder kemudian disatukan menjadi narasi utuh tentang politik identitas Tionghoa Muslim dari era Oei Tjeng Hien hingga peran Masjid Lautze kini.

Hasil Penelitian

Analisis temuan menunjukkan bahwa pendekatan identitas dan multikulturalisme relevan untuk memahami ruang politik Tionghoa Muslim di Indonesia. Politik identitas yang dijalankan kelompok ini berangkat dari kesadaran akan perbedaan etnis dan agama yang mereka miliki, sekaligus sebagai upaya untuk merespons kepentingan komunitas secara utuh di ruang publik. Pendekatan ini membentuk identitas sosial yang memengaruhi sikap, perilaku, dan interaksi Tionghoa Muslim dengan masyarakat luas. Di satu sisi, keberadaan mereka kerap dihadapkan pada stigma sosial, diskriminasi, dan stereotip negatif; di sisi lain, arus globalisasi dan perubahan sosial-politik mendorong politik identitas menjadi instrumen penting untuk memperjuangkan posisi dan hak kelompok, sepanjang dimanfaatkan untuk tujuan positif.

Kiprah Politik Identitas Oei Tjeng Hien

Politik identitas Tionghoa Muslim merupakan fenomena yang sering diperbincangkan dalam kehidupan berdemokrasi. Sebagian besar kalangan menganggap bahwa politik identitas ini merupakan penghalang bagi kehidupan berdemokrasi. Beberapa fakta dari pergerakan politik seorang Oei Tjeng Hien dan perkembangan organisasi Tionghoa Muslim menegaskan bahwa politik identitas masih menjadi fenomena yang mewarnai praktik relasi kekuasaan di beberapa daerah (Ubed, 2002).

Pergerakan politik Oei Tjeng Hien sebagai seorang Tionghoa Muslim telah dimulai sejak masa mudanya setelah Oei menjadi seorang mualaf. Ketika itu banyak tokoh-tokoh Islam di Bintuhan yang datang mengunjungi rumahnya untuk mengucapkan selamat telah bersatu dalam persahabatan Muslim, hal ini memunculkan harapan baru bagi penyebaran Islam di masa itu ketika yang masuk Islam bukan seorang Melayu, melainkan seorang tokoh Tionghoa yang disegani. Sebaliknya, di kalangan masyarakat Tionghoa di Bintuhan pada masa itu memunculkan pro dan kontra. Namun demikian, Oei ternyata tetap dipercaya oleh para tokoh Tionghoa lainnya untuk menjadi pimpinan Tiong Hoa Hwee Koan di Bintuhan (Karim, 1982).

Di tengah suasana antipati masyarakat terhadapnya, terutama masyarakat Tionghoa masa itu, Oei meluaskan jejaringnya dengan tokoh-tokoh Pergerakan Nasional dan Islam seperti A.M. Sangadji, Syekh Sukarti (Syarikat Islam), H. Zamzam, Hasan Bandung, dan M. Sabirin (Persatuan Islam). Dari pergaulannya ini, Oei kemudian menghendaki untuk mendirikan Syarikat Islam di Bintuhan, tetapi niatnya tersebut ditentang suara mayoritas yang ingin mendirikan Muhammadiyah. Oei pun kemudian didapuk menjadi ketuanya (Wiwoho, 2016).

Aktivitas giat dakwah Muhammadiyah yang dimotori Oei Tjeng Hien di Bintuhan ternyata mengundang kecurigaan pihak kolonial Belanda. Pada 1930, Residen Groeneveld melaporkan hal ini kepada *Hoofd Bestuur* (Pengurus Besar) Muhammadiyah Jogjakarta yang kemudian mengutus H. Muchtar ke Bintuhan untuk meminta Oei mundur dari kepengurusan Muhammadiyah Bintuhan. Misi Muchtar gagal karena ternyata Oei mendapat dukungan penuh dari segenap pengurus dan anggota Muhammadiyah Bintuhan. Percobaan pembunuhan kepada Oei dengan menggunakan motif rasisme juga sempat dilakukan dengan menyebut Oei sebagai ‘Cina Padang yang ingin jadi raja’, namun percobaan ini juga gagal. Kolonial Belanda kemudian melakukan intrik fitnah yang berhasil membuat Oei masuk penjara.

Sekitar pertengahan tahun 1933, Oei berhasil meningkatkan minat para pemuda Tionghoa di Bintuhan terhadap Islam melalui kegiatan kepemudaan di HW (Hizbul Wathan), salah satunya kegiatan orkes musik. Awalnya Oei mendatangkan seorang anggota HW dari Bengkulu yang bernama Ramli bin Marzuki. Selain aktif dan dikenal sebagai dermawan di Hizbul Wathan, Ramli juga memiliki ketrampilan memainkan tambur, terompet, dan akrobatik sepeda. Berkat pelatihan yang dilakukan Ramli, para remaja Hizbul Wathan menjadi semakin aktif dalam beraktivitas yang kemudian berhasil menarik minat para anak-anak dan remaja Tionghoa maupun dari golongan non-Muhammadiyah. Ide yang digagas Oei ini kemudian berhasil memunculkan regenerasi kegiatan orkes musik di Hizbul Wathan yang justru datang dari pemuda Tionghoa berbakat bernama Tjong A Tjin. Selain sebagai pelatih orkes musik, A Tjin juga menjadi seorang mualaf. Ia menamatkan sekolah Muhammadiyah di Bintuhan dan Padang Panjang.

Ketika terjadi monopoli oleh agen-agen kapal KPM (*Koninklijke Paketvaart-Maatschappij*) yang bersikap semena-mena terhadap para pedagang di Bintuhan, Oei mengorganisir perlawanan dengan mencarter kapal Tionghoa yang ongkos kirimnya lebih murah serta pelayanan yang lebih baik. Perlawanan Oei ini membuat pihak KPM kalang kabut hingga mendatangkan pihak direksi KPM dari Jakarta. Upaya Oei dan kawan-kawannya tersebut kemudian berhasil membuat pihak KPM menurunkan harga dan memperbaiki pelayanan mereka kepada para pedagang di Bintuhan dan Bengkulu.

Ketika Perang Dunia II berkecamuk dan Jepang menduduki Bengkulu pada 1942, Oei yang ketika itu menjabat Konsulat Pengurus Pusat Muhammadiyah Bengkulu, dijemput paksa oleh tentara Jepang dari rumahnya dan dihadapkan kepada Taota, Kepala Polisi Jepang di Bengkulu. Ketika itu ratusan warga Tionghoa dan Muhammadiyah mengiringi Oei selama ia dibawa ke kantor polisi di daerah Banteng. Oei kemudian dipojokkan mengapa perintah Dai Nippon (Imperium Jepang) untuk membubarkan Muhammadiyah Bengkulu tak kunjung dilaksanakan, yang kemudian dijawab oleh Oei dengan pembelaan bahwa membubarkan Muhammadiyah berarti membubarkan Islam, dan jika hal itu dilakukan maka Dai Nippon akan dikutuk oleh ratusan juta umat Islam di seluruh dunia dan menimbulkan ketidakpercayaan kepada Dai Nippon selaku pemimpin di Asia Timur Raya. Pembelaan Oei itu ternyata sanggup membatalkan niat Jepang untuk membubarkan Muhammadiyah di Bengkulu, sesuatu hal yang cukup mustahil pada waktu itu ketika di berbagai daerah Jepang membubarkan berbagai ormas Islam, termasuk Muhammadiyah.

Dalam komunikasi politik, teori multikulturalisme dikenal juga sebagai politik pengakuan, yang terfokus pada pentingnya hak atas penghargaan yang sama dalam pemaknaan hidup yang baik dalam membentuk identitas manusia serta tuntutan kesetaraan. Termasuk dalam hal ini politik pengakuan etnis Tionghoa sebagai Muslim adalah mempromosikan dan mengakui kekhasan model budaya dan tradisi yang melekat padanya (Paskarina, 2016). Etnisitas dan status keislaman ini menjadi keniscayaan bagi kalangan Tionghoa Muslim dalam peranan dan kegiatan politik mereka di Indonesia.

Salah satu bukti dari keniscayaan status keislaman sebagai pengakuan politik dapat juga dilihat dari kejadian saat Jepang hampir masuk ke Bengkulu. Ketika itu tokoh-tokoh Tionghoa di Bengkulu yang dipimpin Sie Tjie Hoo datang menghadap Bung Karno. Mereka meminta perlindungan dan jaminan pada Bung Karno agar nanti tidak ditangkap dan dianiaya tentara Jepang jika Jepang masuk ke Bengkulu. Pada waktu itu Bung Karno menjawab: "Saudara-saudara harus masuk Islam. Harus disunat." Sikap depersonalisasi ini menjadi faktor terakhir penunjang identitas sosial di tengah ketionghoan para tokoh Tionghoa pada waktu itu, yaitu suatu sikap dimana individu akan mengurangi nilai-nilai yang ada pada dirinya demi bisa

diterima di kelompoknya (Zamroni & Purwaningsih, 2019). Namun sebelum sempat disunat, tentara Jepang masuk. Mereka semua pun ditangkap.

Dalam kampanye Pemilu 1955, Oei berhasil mendapatkan dukungan dari masyarakat termasuk dari golongan Tionghoa di berbagai daerah seperti Pati, Rembang, Semarang, Demak, Kudus, Jakarta dan sekitarnya untuk menduduki kursi mewakili Masyumi. Pidato-pidato Oei diterjemahkan dalam bahasa Jawa yang menarik minat para pendukungnya. Pada 30 Agustus 1956, Oei kemudian dilantik oleh M. Hatta selaku Wakil Presiden.

Namun terlepas dari keislamannya, bahkan seorang Tionghoa Muslim seperti Oei Tjeng Hien pun tak dapat menghindari dari hakikat etnis yang melekat padanya secara fisik. Ketika terjadi Aksi Tritura pada Maret 1966 yang dipelopori oleh Kesatuan Aksi KAMI, KAPI dan KAPPI, Oei Tjeng Hien pernah mengalami eksekusi dari aksi tersebut. Pada waktu itu Oei dan keluarganya yang sedang mengendarai mobil dihentikan di daerah Slipi oleh massa pemuda KAMI dan KAPI. Makian rasis seperti “Cina!”, “Cina! Turun!” dan tindakan untuk merebut mobil yang ditumpangnya dialami Oei dan keluarganya. Beruntung salah satu pemuda dalam aksi tersebut mengenal Oei dan berhasil menghentikan aksi massa dengan menyebut bahwa Oei adalah seorang pemuka Islam, pemimpin Muhammadiyah dan pemimpin Masyumi. (Karim, 1982).

Terinspirasi dengan pesan K. H. Ibrahim (Ketua PP Muhammadiyah periode 1923-1934), yang menceritakan bagaimana kiat zending, yaitu kegiatan menyebarkan agama melalui pekabaran Injil dan misi untuk menarik masyarakat masuk ke agama Kristen dan Katolik, Oei kemudian mengajak H. Abdul Somad Yap A Siong dan kawan-kawan lainnya mendirikan PIT (Persatuan Islam Tionghoa) pada 1953 yang kemudian berubah menjadi PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) pada 1961 (Hasanah, 2021).

PIT dan PITI

Untuk memelopori dakwah di kalangan masyarakat Tionghoa, serta untuk merangkul dan mengasuh orang-orang Tionghoa yang masuk Islam, pada tanggal 14 April 1961 Oei dan kawan-kawannya mendirikan PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) atau *Yinni Yisilan Huayi Xuehui* 印尼伊斯兰华裔协会 di Jakarta. Sewindu sebelum PITI berdiri, sebenarnya cikal bakal organisasi ini telah terlebih dahulu ada yaitu PIT (Persatuan Islam Tionghoa) atau *Hoa Ming Hoei Kauw Hwee* (*Hua Ming Hui Jiao Hui* 華明回教會) yang didirikan di Jakarta oleh Oey Tjeng Hien (Abdul Karim), Yap A Siong (Abdul Somad), Soei Ngo Sek (Abdul Hamid), Thio Lok Soei, Kho Goan Tjin, Tjan Tjauw Bin dan kawan-kawannya pada tanggal 5 Januari 1953.

Pada tahun 1961 nama organisasi PIT kemudian diubah dan dideklarasikan menjadi PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) sekaligus mengalami pergantian pengurus di mana Lim Seng Lian menjadi ketuanya. Dua tahun kemudian, pada 1963, Oei Tjeng Hien kembali menjabat sebagai Ketua Umum PITI, sebuah tugas dan tanggung jawab yang diembannya selama satu dasawarsa (1963-1973). Untuk mendukung perkembangan PITI yang maju pesat, pada 1967 didirikan pula Yayasan PITI dengan Oei sebagai ketuanya (El Guyanie, 2018). Yayasan ini kemudian membentuk susunan pengurus wilayah yang cukup lengkap di berbagai Daerah Tingkat I (setara kota) mulai dari Sabang sampai Merauke. Pelantikan pengurus dan pengesahan cabang-cabang PITI tersebut mendapat sambutan baik dari pemerintah daerah serta pejabat sipil dan militer setempat. Banyak di antara pejabat menjabat sebagai Pelindung dan Penasehat PITI.

Karena dianggap bernuansa eksklusivisme, pada tahun 1972 pemerintah Orde Baru melalui Jaksa Agung melarang penggunaan nama dan istilah ‘Islam Tionghoa’ yang disematkan pada kepanjangan dari PITI. Akibat larangan tersebut, Pimpinan Pusat PITI akhirnya terpaksa

membubarkan diri pada tanggal 1972 yang dinyatakan melalui Surat Keputusan PITI No. 100/PP/Kep./1972 tanggal 5 Desember 1972. Namun demi tetap dapat berdakwah dan mewadahi kelompok Tionghoa Muslim yang ada di Indonesia, pada 15 Desember 1972 organisasi ini diresmikan kembali dengan nama “baru” yaitu Pembina Iman Tauhid Islam dengan singkatan yang sama, PITI, (Mansoer, 1972) di mana Oei dan kawan-kawannya masih tetap melanjutkan menjadi pengurus organisasi ini, bekerja sama dengan Muhammadiyah. Ketika Presiden Gus Dur berkuasa (1999-2001), PITI kemudian dapat menggunakan kembali nama sesuai singkatan aslinya, Persatuan Tionghoa Islam Indonesia (Muhyidin, 2017).

Penggunaan kembali nama PITI menunjukkan budaya asli Tionghoa Muslim tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Islam mereka. Keberadaan PITI berperan penting dalam membantu Muslim Tionghoa untuk memahami hukum Islam dan ajaran Islam (Mahfud et al., 2024). Upaya penggunaan nama ‘Islam Tionghoa’ ini menunjukkan bahwa proses keberterimaan sosial terhadap Tionghoa Muslim sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka mempertahankan identitas kultural sambil mempraktikkan nilai-nilai Islam yang inklusif (Susanto & Wibowo, 2020).

Selepas wafatnya H. Abdul Karim Oei Tjeng Hien pada 1988, kemudian pada 1991 dibentuklah Yayasan Abdul Karim Oei Tjeng Hien untuk mengenang jasa-jasa Oei, yang dalam perjalanannya kemudian mendirikan Masjid Lautze yang kini dipimpin oleh putra Oei Tjeng Hien, yaitu H. Ali Karim Oei Tek Lie yang meneruskan peran sang ayah dalam pengayoman bagi kelompok Tionghoa Muslim.

Masjid Lautze sebagai Simbol Politik Identitas Tionghoa Muslim

Berkat kegigihan para pengurus dan anggota Yayasan Abdul Karim Oei Tjeng Hien, akhirnya pada tanggal 4 Februari 1994 Masjid Lautze dapat berdiri di Jl. Lautze, Jakarta Pusat dan diresmikan oleh Prof. Dr. B. J. Habibie (Wiwoho, 2016). Posisi masjid berarsitektur Tiongkok yang berada di tengah kota Jakarta serta nama “Oei Tjeng Hien” memiliki daya tarik tersendiri dalam menjadi pusat dakwah serta wadah persatuan Tionghoa Muslim (Zahra & Goeyardi, 2022; Fikri & K, 2022).

Dasar pembangunan Masjid Lautze adalah *rahmatan lil’alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Tidak memandang suku, ras, etnis, maupun agama (Nurjaman & Gumilar, 2021). Namun karena nama dan arsitekturnya, masjid ini tetap identik dengan etnis Tionghoa Muslim. Masjid Lautze dalam bentuk bangunan dalam hal ini menjadi simbol penunjuk identitas ketionghoan sebagai ciri khas mereka, namun sebagai komunitas Tionghoa Muslim, dalam hal ini Masjid Lautze menjadi simbol perwujudan multikulturalisme di Indonesia. Konsep multikulturalisme adalah suatu paham tentang mengakui keberagaman budaya masyarakat dari berbagai latar belakang suku, bahasa dan agama (Manalu & Lase, 2024).

Dalam pandangan Oei Tjeng Hien, problem dakwah Islam di kalangan masyarakat Tionghoa merupakan warisan sejarah masa lalu, yaitu ketika kolonial Belanda mencekoki citra buruk tentang Islam sehingga menjadi hambatan mental tersendiri bagi orang Tionghoa yang tertarik dengan Islam. Oei pernah menyampaikan bahwa orang Tionghoa yang masuk Islam harus tetap berpegang juga pada didikan budaya leluhurnya yang telah berlaku turun-temurun, misalnya berbakti kepada orangtua. Sikap bakti ini dikenal dengan istilah “u-hao” (Hokkian; Mandarin: Youxiao 有孝). Perlu waktu untuk meyakinkan orang-orang Tionghoa yang berminat masuk Islam bahwa sebagai mualaf justru akan lebih mencintai orangtuanya. Oei meyakini jika hal ini dapat disebarluaskan melalui wadah pembinaan yang terorganisir, seperti Masjid Lautze, maka kelompok Tionghoa di Indonesia akan dapat merasakan bahwa Islam sebenarnya dekat pada tradisi dan budaya Tionghoa. Upaya ini selaras dengan implementasi interaksi simbolik dalam upaya merangkul kelompok Tionghoa Muslim, yaitu sebuah

pendekatan dalam sosiologi dan ilmu komunikasi yang menjelaskan bagaimana manusia menciptakan makna dan pemahaman melalui interaksi sosial menggunakan simbol, bahasa, dan interaksi (Ahmadi, 2008).

Dalam berpolitik, komunitas Masjid Lautze selama ini bersikap netral. Namun walaupun harus mengambil sikap politik, para pemimpin dan anggota komunitas ini akan berdiri di atas kepentingan Tionghoa Muslim sebagai identitas utama mereka. Sikap politik yang dipilih oleh komunitas Masjid Lautze ini adalah suatu aktivitas politik yang berbasis identitas, atau menggunakan identitas dalam keterlibatan politik. Sebuah upaya simbolis memperjuangkan kepentingan dan kebaikan identitas melalui sarana politik (Bakry, 2021). Masjid Lautze yang diresmikan B. J. Habibie di Jakarta pada 1994 ini bisa dianggap sebagai wadah persatuan sekaligus pusat penjaringan Tionghoa Muslim di Indonesia umumnya, di Jabodetabek khususnya, sesuai cita-cita Oei Tjeng Hien (Raymon, 2025).

Ali Karim Oei, putra Oei Tjeng Hien, menyatakan bahwa dakwah Islam di kalangan etnis Tionghoa tidak bisa hanya mengandalkan faktor kondusif, melainkan perlu mempertimbangkan faktor akomodatif dari umat Islam itu sendiri dalam menyikapi perbedaan budaya, agar kedua belah pihak bisa bersama-sama bekerja menimbun jurang pemisah dan mengisinya dengan saling menghormati dan saling pengertian. Upaya ini sejalan dengan pendekatan pertalian sosial yang menekankan pentingnya hubungan dan interaksi dalam membentuk pemahaman bersama.

Berdasarkan perspektif politik Oei Tjeng Hien dan Ali Karim Oei melalui Masjid Lautze, dilakukan wawancara terhadap dua kelompok responden, yaitu: Tionghoa Muslim yang menjadi umat atau tamu di Masjid Lautze, serta masyarakat umum baik Tionghoa maupun non-Tionghoa di sekitar Masjid Lautze di Jakarta, Bandung dan Cirebon. Proses wawancara dilakukan secara acak melibatkan 30 (tiga puluh) orang baik tokoh maupun anggota masjid dan masyarakat di sekitarnya.

Tabel 1. Hasil Wawancara dengan Responden Tionghoa Muslim di Masjid Lautze

Responden	Status Tionghoa Muslim	Alasan
I	Tak terhindarkan	Keterbukaan zaman
II	Tetap mempertahankan tradisi leluhur	Keislaman tidak menghilangkan ketionghoaan
III	Tak terhindarkan	Mendapat hidayah
IV	Salah satu cara pembauran	Agama Islam pembuka jalan
V	Salah satu cara pembauran	Agama Islam pembuka jalan
VI	Tetap mempertahankan tradisi leluhur	Keislaman tidak menghilangkan ketionghoaan

Sumber: Data Penelitian, 2025

Umat Islam yang bersembahyang di Masjid Lautze memang didominasi warga Tionghoa yang memutuskan menjadi mualaf. Para mualaf ini terdiri dari kalangan muda, intelektual dan pengusaha, serta masyarakat Tionghoa secara umum. Yang menjadi khotib juga didorong dari kalangan Tionghoa Muslim. Para jemaahnya kerap menggelar pertemuan berkala setiap Ahad. Masjid Lautze yang dikelola Yayasan Haji Karim Oei dalam hal ini berupaya menjadi wadah pendampingan bagi para mualaf menghadapi berbagai persoalan seperti pembauran dan benturan budaya agar dapat terselesaikan dengan baik.

Tidak bisa dipungkiri bahwa penerimaan sosial masyarakat terhadap kaum Tionghoa Muslim justru datang dari lingkungan terdekat dan keluarga. Isu ini tidak lepas dari adanya pemahaman yang salah di masyarakat. Orang Tionghoa menganggap yang masuk Islam akan menjadi seperti orang bumiputera yang “lembek”, sementara orang bumiputera menganggap

orang Tionghoa sebagai oportunis. Karena itu keluarga mereka tidak rela jika ada anggota keluarganya menganut agama Islam yang identik sebagai agama bumiputera. Untuk itu Yayasan Haji Karim Oei terus melakukan pendampingan dan pembinaan bagi kelompok Tionghoa Muslim melalui pendekatan yang memperhatikan masalah budaya.

Dalam kerangka multikulturalisme, tabel di atas menunjukkan adanya penerimaan terhadap status keislaman kelompok Tionghoa yang dianggap tak terhindarkan di tengah keterbukaan zaman. Keislaman dianggap tidak menghilangkan tradisi dan budaya ketionghoaan. Status sebagai muslim juga diterima dengan beberapa variabel: hidayah dan pembuka jalan untuk pembauran. Dengan demikian integrasi sosial Tionghoa Muslim tidak hanya bergantung pada status keagamaan, tetapi juga pada akses ke jaringan sosial dan penerimaan masyarakat mayoritas.

Sedangkan pada tabel di bawah menunjukkan perbedaan pandangan terhadap etnis Tionghoa baik yang muslim dan non-muslim. Beberapa parameter menunjukkan etnis Tionghoa, terlepas dari agama yang dianutnya, masih dipandang sebagai kelompok eksklusif yang gagap dalam komunikasi politik bahkan cenderung apolitis. Namun untuk golongan Tionghoa yang memeluk agama Islam dipandang lebih diterima dan lebih luwes dalam berpolitik di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Responden menilai kiprah Masjid Lautze dalam berdakwah dan menaungi Tionghoa Muslim ini sebagai ruang integrasi yang memfasilitasi pembauran tanpa menghapus ciri khas budaya Tionghoa. Temuan ini sejalan dengan fungsi yang integrasi sosial (Sunesti & Woodward, 2015).

Tabel 2. Wawancara Responden Masyarakat terhadap Tionghoa Muslim di Masjid Lautze

Responden	Politik Tionghoa menurut masyarakat	Alasan
I	Tionghoa Muslim lebih luwes di masyarakat	Pengaruh agama Islam
II	Tionghoa Non Muslim lebih eksklusif	Lebih berkelompok
III	Tionghoa di Indonesia sama saja	Fokus di ekonomi
IV	Tionghoa Muslim lebih membaur	Pengaruh agama Islam
V	Tionghoa Muslim lebih diterima	Agama Islam pembuka jalan
VI	Tionghoa cenderung apolitis	Stigma di masyarakat
VII	Tionghoa Muslim lebih bebas berpolitik	Masuk agama mayoritas
VIII	Tionghoa Muslim lebih bebas berpolitik	Masuk agama mayoritas

Sumber: Data Penelitian, 2025

Pada awal Reformasi, muncul berbagai organisasi Tionghoa, termasuk partai politik yang berusaha masuk ke parlemen. Organisasi Tionghoa seperti Yayasan Haji Karim Oei yang bukan berlandaskan politik, tetap memiliki andil dalam mencoba menjembatani hubungan dengan pemerintah dan warga masyarakat lain melalui kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Sementara itu, di kalangan non-Tionghoa berpendapat kegiatan dalam rangka pembauran dengan berlabel Islam memungkinkan lebih diterima.

Dalam kerangka komunikasi politik, tabel di atas menunjukkan baik Tionghoa non-Muslim maupun Tionghoa Muslim, masing-masing tetap memiliki identitasnya sendiri. Orang Tionghoa tetap memiliki stigma sebagai pedagang, apolitis dan cenderung lebih eksklusif. Keberadaan Masjid Lautze di tengah keberagaman sebagai wadah Tionghoa Muslim menjadi upaya menjembatani komunikasi minoritas ini yang cenderung menjadi “gagap” karena status keislamannya yang dianggap “membaur” atau mengasimilasikan diri atas dasar kesamaan agama, walau tidak berdasarkan kesamaan budaya. Bagaimanapun, Islam tetap dianggap menjadi salah satu jalan keluar bagi kalangan Tionghoa Muslim agar dapat berpolitik dengan lebih leluasa.

Pembauran religi seperti yang ditempuh beberapa tokoh Tionghoa Muslim di Indonesia memang sering dianggap yang paling berarti. Tetapi bukan berarti pendekatan kultural tidak memiliki makna signifikan. Justru dengan pendekatan kultural sebagaimana digagas Oei Tjeng Hien lewat Yayasan Haji Karim Oei dan Masjid Lautze, dapat menjangkau masyarakat Tionghoa secara lebih luas. Hal ini sejalan dengan harapan Ali Karim Oei, yaitu Masjid Lautze ini dapat kian memasyarakat.

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik politik yang dijalankan oleh Tionghoa Muslim—sebagaimana dicontohkan Oei Tjeng Hien dan diteruskan melalui peran Masjid Lautze—bukan sekadar upaya mempertahankan eksistensi kelompok minoritas, tetapi juga strategi membangun jembatan antaridentitas. Politik yang berdimensi keberterimaan terhadap keberagaman memerlukan kesadaran untuk menjadikan perbedaan sebagai modal sosial, bukan hambatan. Dalam konteks ini, Masjid Lautze menjadi simbol bahwa ruang keagamaan dapat sekaligus menjadi arena politik yang memupuk inklusivitas, saling menghormati, dan solidaritas lintas etnis.

Lebih jauh, penelitian ini memberikan contoh bahwa politik identitas tidak harus berwajah eksklusif atau memicu segregasi, melainkan dapat diarahkan pada penguatan kohesi sosial. Dengan memelihara unsur budaya Tionghoa sekaligus mempraktikkan nilai-nilai Islam yang universal, komunitas Tionghoa Muslim menunjukkan model politik yang adaptif dan akomodatif terhadap keragaman. Hal ini menjadi relevan bagi Indonesia sebagai negara multikultural, di mana keberhasilan integrasi politik sangat bergantung pada sejauh mana aktor-aktor politik mampu mengelola perbedaan menjadi kekuatan bersama.

Kesimpulan

Studi kemunculan Tionghoa Muslim dalam komunitas nasional bisa dilakukan dari perspektif "etnis" sebagai area di mana identitas orang Tionghoa Muslim dibentuk oleh hubungan sosial lokal, di mana ketionghoaan menjadi warisan, status politik, atau sekadar warna kulit. Dengan demikian, beberapa Tionghoa Muslim mempertahankan sebagian narasi Tionghoa mereka, sambil mengadopsi narasi baru sebagai seorang muslim untuk membuka lebih banyak ruang dalam mencapai tujuan politik mereka yaitu berdakwah bagi golongan masyarakat Tionghoa di Indonesia.

Kiprah politik seorang tokoh Tionghoa Muslim seperti Oei Tjeng Hien dan keberadaan pusat dakwah bagi Tionghoa Muslim yang berpusat di Masjid Lautze Jakarta, memberi kita beberapa wawasan sekaligus pertanyaan tentang identitas nasionalisme, agama, dan etnis yang hidup berdampingan dalam konteks multikulturalisme. Studi ini juga mendukung gagasan bahwa identitas dibangun secara sosial, dan tidak hanya dibangun oleh keadaan eksternal, tetapi juga oleh individu atau kelompok itu sendiri. Ekspresi ketionghoaan, keislaman serta keindonesiaan yang ditunjukkan golongan Tionghoa Muslim menunjukkan bahwa ada nuansa identitas sebagai peningkatan kesadaran politik baik secara individu maupun komunal di tengah masyarakat yang terus berubah.

Kenyataan yang sebenarnya adalah bahwa Tionghoa Muslim lebih suka berbaur dengan masyarakat umum sehingga mereka dapat bersikap dan diperlakukan sama seperti orang lain. Status Tionghoa Muslim dan berbagai atribut yang melekat bersamanya memang bisa menjadi suatu keniscayaan alat politik identitas, tetapi karya dan dakwah serta partisipasi Tionghoa Muslim secara tak langsung sudah menjadi kiprah politik tersendiri yang patut diapresiasi di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Peranan dari H. Abdul Karim Oei Tjeng Hien dan Masjid Lautze sebagai wadah Tionghoa Muslim menjadi salah satu strategi politik identitas etnis Tionghoa sekaligus kegiatan dakwah untuk mengenalkan Islam ke etnis Tionghoa ditengah masyarakat Indonesia.

Kesimpulan ini ditutup dengan mengutip semangat politik Oei Tjeng Hien sewaktu memimpin Muhammadiyah di Bengkulu pada 1950an, "Tuhan memerintahkan agar umat Islam menggunakan akal, yakni akal sehat. Dengan niat ikhlas kami akan bekerja bergotong-royong menjalankan segala amal usaha perserikatan dan bersatu teguh menghadapi segala kemungkinan. Ibarat lidi, kalau hanya sebatang tidak kuat. Tetapi bila diikat menjadi satu, bisa membersihkan segala kotoran".

Ucapan Terima Kasih

Selayaknya kacang tak boleh lupa dengan kulitnya, terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Dr. Putri Agus Wijayati, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam menulis artikel penelitian dan pengembangan ini. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Mukhamad Shokheh, S.Pd., M.A., Ph.D., selaku Kepala Program Studi Kajian Sejarah UNNES yang telah aktif memberikan petunjuk dalam perkuliahan dan juga mendorong untuk menyelesaikan dan menerbitkan penelitian ini.

Daftar Rujukan

- Ahmadi, D. (2008). Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(2), 301–316. <https://ilmukomunikasiumj.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/09/interaksionisme-simbolik.pdf>.
- Alansyah, F. (2017). *Muslim Tionghoa di Jakarta: Peran Yayasan Haji Karim Oei Sebagai Wadah Dakwah Muslim Tionghoa 1991-1998* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/35585>.
- Bakry, U. S. (2021). *Multikulturalisme & Politik Identitas*. Rajawali Press.
- El Guyanie, G. (2018). Dinamika Politik Muslim Tionghoa. *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 7(2), 241–300. <https://doi.org/10.14421/inright.v7i2.1794>.
- Fikri, M., & K, H. F. N. (2022). Masjid Sebagai Ruang Representasi Publik: Kajian Tentang Praktik Sosial Dan Pemberdayaan Umat. *Jurnal Dakwah*, 23(1), 59–76. <https://doi.org/10.14421/jd.23.1.22.1>.
- Ham, O. H. (1983). *Rakyat dan Negara*. Penerbit Sinar Harapan.
- Hasanah, E. P. (2021). Sepak Terjang PITI Jawa Timur di Tengah Pusaran Hubungan Bilateral Indonesia-Tiongkok. *SIYAR Journal*, 1(2), 3–26. <https://doi.org/10.15642/siyar.2021.1.2.3-26>.
- Hidayatulloh, D. (2021). Strategi Pembinaan Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Religius Pada Mualaf Etnis Tionghoa di Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Surabaya. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 7(2), 259–270. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v7i2.10534>.
- Irma, A. (2018). Muslim Tionghoa Sebagai Liyan Dalam Konsep Ukhuwwah Islamiyah. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 18(2), 161–180. <https://doi.org/10.21009/communications.4.1.4>.
- Karim, H. A. (1982). *Mengabdikan Agama, Nusa dan Bangsa: Sahabat Karib Bung Karno*. PT. Gunung Agung.
- Mahaswara, H. A. (2017). Muslim Tionghoa Sebagai Jembatan Budaya: Studi Tentang Partisipasi Dan Dinamika Organisasi PITI Yogyakarta. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 2(1), 79–96. <https://doi.org/10.22515/shahih.v2i1.704>.

- Mahfud, C., Salamah, U., Ahmad Hasyim, M. Y., Nuryana, Z., & Fadhilah Lubis, M. A. (2024). Islamic Law Practice among East Javanese Chinese Muslims; PITI's Contribution on Its Enforcement. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 19(1), 197–220. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i1.12503>.
- Manalu, F. J., & Lase, A. (2024). Multikulturalisme: Konsep, Dampak, Dan Strategi Pengelolaan Keragaman Budaya Dalam Konteks Global. *Kultura*, 2(6), 357–362. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1599>.
- Mansoer, M. A. (1972). *Ekawarsa Persatuan Islam Tionghoa Indonesia PITI Wilayah Jogjakarta*. PITI Wilayah Jogjakarta.
- Mardotillah, M., Hendro, A., Soemarwoto, R., & Raksanagara, A. (2020). Peran Masjid Lautze 2 Bandung dalam Dakwah dan Budaya. *Khazanah Theologia*, 2(1), 9–22. <https://doi.org/10.15575/kt.v2i1.8188>.
- Muhyidin, M. (2017). *Peran Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (Piti) Terhadap Islamisasi di Indonesia* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mustomi, O., & Hakim, A. R., Ansar, & Rosyid, A. F., (2024). *Globalisasi Dan Perubahan Sosial Politik*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Nurjaman, I. M., & Gumilar, S. (2021). Kontribusi Aktivis Mesjid Lautze 2 Bandung dalam Merangkul Mualaf Tionghoa Tahun 2016-2021. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1(4), 429–436. <https://doi.org/10.15575/kt.v2i1.8188>.
- Paskarina, C. (2016). *Merebut Kontrol Atas Kekuasaan*. PolGov.
- Raymon, A. (2025). Pemanfaatan Media Sosial Dalam Proses Pengayoman Komunitas Tionghoa Mualaf di Masjid Lautze. *IJSTECH: Indonesian Journal of Science, Technology and Humanities*, 3(1), 32–38. <https://doi.org/10.60076/ijstech.v3i1.1285>.
- Rozi, F. (2023). Komitmen Keagamaan Komunitas Muslim Tionghoa: Studi Kasus Pada Lembaga Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Kota Surabaya. *TARBAWI: Jurnal Pendidikan dan Keagamaan*, 11(1), 25–46. <https://doi.org/10.62748/tarbawi.v11i01.72>.
- Sahlan. (2023). Studi Masyarakat Sosial Dalam Perspektif Kelompok Sosial Dan Stratifikasi Sosial. *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.62238/jupsi.v1i1.93>.
- Sunesti, Y., & Woodward, M. (2015). Chinese Muslim Conversion, Identity, and Integration in Indonesia. *Studia Islamika*, 22(3), 377–407. <https://doi.org/10.15408/sdi.v22i3.2357>.
- Susanto, E. H., & Wibowo, A. (2020). Chinese Muslim Identity and Religious Conversion in Indonesia: Negotiating Ethnicity, Religion, and Citizenship. *Journal of Indonesian Islam*, 14(2), 345–368. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.2.345-368>.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In A. W.G. & W. S. (Eds.), *The Social Psychology of Intergroup Relations*. Brooks/Cole.
- Ubed, A. S. (2002). *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Indonesia Tera.
- Wiwoho, B. (2016). *Yayasan H. Karim Oei & Masjid Lautze Rumah Bagi Muslim, Indonesia dan Keturunan Tionghoa*. Teplok Press.

- Zahra, D. N., & Goeyardi, W. (2022). Akulturasi Budaya Islam dan Cina Pada Ornamen Kaligrafi yang Terdapat di Dalam Bangunan Masjid Lautze Jakarta. *Jurnal Cakrawala Mandarin*, 6(2), 530-542. <https://doi.org/10.36279/apsmi.v6i2.227.g132>.
- Zamroni, M. M., & Purwaningsih, S. M. (2019). Islamisasi Masyarakat Tionghoa Surabaya Masa Orde Baru. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 7(1), 1-10. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/26940>.